PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Kamis Tanggal: 29 Juni 2017 Halaman: 13

7 Sekolah SMP Terapkan Sistem SKS

YOGYA, TRIBUN- Sejumlah sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Yogyakarta akan menerapkan sistem satuan kredit semester (SKS). Layaknya kuliah, sekolah tersebut memungkinkan siswa yang berprestasi akan bisa menyelesaikan pembelajaran lebih cepat.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Edy Heri Suasana menjelaskan, ada tujuh SMP yang akan menerapkan sistem SKS tersebut. Tujuh sekolah ini di antaranya adalah SMP Muhammadiyah 3 Yogya, SMPN 2, SMPN 5, SMPN 16, SMPN 8, SMPN 7, dan SMPN 1.

"Sistem SKS ini akan diterapkan pada tahun ajaran baru, namun beberapa sekolah di luar DIY sudah ada yang menerapkan," jelasnya, Rabu (28/6).

Aturan terkait dengan penerapan sistem SKS ini mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 158 Tahun 2014. Adapun sejumlah persyaratan teknis untuk sekolah yang menerapkan sistem tersebut di antaranya jumlah ruang belajar harus lebih banyak dari rombongan belajar (rombel), jumlah guru memadai, serta setiap ruangan mulai dari laboratorium hingga musala yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran.

Banyaknya ruang belajar itu, kata dia, untuk persiapan *moving class*. *Moving class* ini dilaksanakan agar potensi peserta didik dapat benar-benar terasah. Sementara, untuk kurikulum pendidikan maupun muatan lokal yang diajarkan tidak ada perubahan.

Dia menyebutkan, bagi sekolah yang hendak menerapkan sistem SKS tersebut, harus membuat analisa dan memaparkan ke Dinas Pendidikan. Pihak-

● ke halaman 14

7 Sekolah SMP Terapkan

● Sambungan Hal 13

nya juga akan melakukan pengujian sebelum menyatakan sekolah tersebut dinyatakan layak menerapkan sistem SKS.

Jika sudah dinyatakan bisa menggunakan sistem ini, sekolah yang lolos akan melaksanakan sistem SKS bertahap mulai dari kelas tujuh dulu pada tahun pertama. Dari penghitungan, ada 240 SKS untuk menyelesaikan jenjang pendidikan SMP.

"Dalam kondisi normal total SKS tersebut bisa diselesaikan dalam enam hingga delapan semester. Namun jika sampai delapan semester belum selesai, maka ada kemungkinkan dikenai *drop out* (DO) layaknya dalam sistem perkuliahan," ulasnya.

Meskipun ada sistem DO, namun, bagi siswa berprestasi akan memungkinkan untuk menyelesaikan pembelajaran secara lebih cepat. Sebaliknya, bagi siswa yang kurang optimal maka pembelajarannya akan lebih lambat.

Menurut Edy, total 240 SKS ini bisa jadi hanya diselesaikan empat semester atau dua tahun, bahkan juga memungkinkan sampai empat tahun. Tetapi, tidak ada yang tinggal kelas. Hanya nantinya, ada sejumlah siswa yang mengalami kelebihan SKS.

Persiapan teknis

Ketua Komisi D DPRD Kota Yogya, Agung Damar Kusumandaru meminta dinas pendidikan untuk mempersiapkan hal teknis selama menerapkan sistem tersebut. Dia juga meminta agar siswa tidak menjadi kelinci percobaan sebelum semua fasilitas lengkap dan mendukung.

"Kami juga meminta pada sekolah untuk melibatkan komite sekolah dalam pengambilan keputusan menerapkan sistem SKS tersebut," jelasnya.

Dia menyambut baik adanya penerapan sistem tersebut. Meski demikian, sebagai kebijakan baru hal ini pun akan memunculkan perdebatan dan ketidaksesuaian pada awalnya. Termasuk, sosialisasi pada calon siswa dan orang tua pada sekolah yang menerapkan sistem ini juga diperlukan. Hal ini agar tidak ada siswa yang kaget dengan sistem SKS ini. **(ais)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005